



RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai landasan penyusunan rencana kinerja dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap Perangkat Daerah disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Juli 2023
BUPATI GUNUNGKIDUL



Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 26 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 15.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun. Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sehingga Renja Tahun 2024 disempurnakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan kegiatan dalam Renja PD diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan dan arahan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang serta pemulihan pasca *COVID-19*.

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*Stake holder*) yang ada, baik secara formal maupun non formal.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap Rancangan RPJM Daerah dan Rancangan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan RKPD secara resmi dari Bappeda.

3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Renja

Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD melaksanakan forum PD dan mengacu pada dokumen RKPD.

1.1.3 Keterkaitan Renja dengan Renstra.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2024 berpedoman kepada Rancangan Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan teknis dan rencana program sesuai bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

1.1.4 Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Inspektorat Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2.Landasan Hukum

1.2.1.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

1.2.2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.2.3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 1.2.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 1.2.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 1.2.8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 1.2.9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025;
 - 1.2.11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - 1.2.12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
 - 1.2.13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
 - 1.2.14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 1.2.15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026 ; dan
 - 1.2.16. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 000.7.6.1/1013 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah :
- 1.3.1 Sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif rencana kerja yang sesuai dengan program prioritas;

- 1.3.2 Sebagai tolok ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan
- 1.3.3 Dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
	2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah
	2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP
	5.1 Catatan Penting
	5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
	5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah dan Capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2022 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp10.100.607.163,00 (sepuluh miliar seratus juta enam ratus tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Program = 3 program
 - Jumlah Kegiatan = 12 kegiatan
 - Jumlah Sub Kegiatan = 36 sub kegiatan
 - Jumlah Anggaran = Rp10.100.607.163,00
- dengan rincian berikut :
- Belanja Operasi = Rp9.903.357.163,00
 - Belanja Modal = Rp197.250.000,00

Tingkat penyerapan keuangan Inspektorat Daerah tahun 2022 sebesar 91,14% dengan realisasi sebesar Rp9.205.216.879,00 dari anggaran sejumlah Rp10.100.607.163,00 sedangkan untuk indikator kinerjanya memperoleh persentase sebesar 99,96%. Hal yang menjadikan catatan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dapat mencapai kinerja sesuai yang direncanakan, antara lain sebagai berikut :

1. Serapan pada belanja gaji tidak bisa diserap secara maksimal, hal ini disebabkan karena Jabatan Inspektur saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) selama 1 (satu) tahun.
2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur, terkait Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (menyesuaikan jadwal panggilan dan informasi dari Pusdiklat Jakarta) dan harus berkoordinasi dengan pihak lain seperti Pusat Pembinaan JFA selaku pihak penyelenggara;
3. Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang tidak dapat diprediksi yang merupakan perintah Bupati ataupun pengaduan dari masyarakat.

Namun dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada dasarnya semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adapun kebijakan atau tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain :

1. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal;
2. Meningkatkan peran APIP sebagai *Quality Assurance, Consulting and Early Warning*;
3. Kerjasama dan tanggungjawab ASN dalam mewujudkan sasaran strategis;
4. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi terkait perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
5. Komitmen pimpinan dalam memberikan respon atau tanggapan yang baik.

Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra tertuang dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
sampai dengan Tahun 2023

KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja, Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan PD Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d tahun berjalan
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
6.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
		Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 layanan	11 layanan	11 layanan	11 layanan	100	11 layanan	11 layanan	100	
		Jumlah Dokumen Profil PD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a	
		Jumlah dokumen Renja Tahun 2022 dan Renja Perubahan 2021	10 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	n/a	
6.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra PD Tahun 2021 - 2024	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	100	n/a	n/a	n/a	
		Pelaksanaan Forum PD	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	n/a	n/a	n/a	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	4 dokumen	4 dokumen	25	
6.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Tahun 2022	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	25	
6.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan Tahun 2021	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	25	

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
6.01.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dokumen ROPK	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	3 dokumen	3 dokumen	25
6.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	2 dokumen	2 dokumen	25
6.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	17 Laporan	17 Laporan	25
6.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan e-Monev	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan TEPR	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja/Perangkat Daerah	20 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Laporan	20 Laporan	25
6.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	100	29 dokumen	29 dokumen	100
		Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN	130 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2800 Orang/bulan(50x14)	n/a	n/a	n/a	n/a	700 Orang/bulan(50x14)	700 Orang/bulan(50x14)	25
6.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Laporan	4 Laporan	25
6.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	60 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	n/a	n/a	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	13 Laporan	13 Laporan	25
6.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 orang	49 orang	49 orang	49 orang	100	49 orang	49 orang	100
		Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian ASN	245 ASN	49 ASN	49 ASN	49 ASN	100	49 ASN	49 ASN	100
		Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	150 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	30 orang	100
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	6 dokumen	6 dokumen	25
6.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	135 orang	21 orang	21 orang	21 orang	100	n/a	n/a	100
		Peningkatan kualitas aparat pengawasan (Pelatihan Kantor Sendiri/PKS)	20 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120 Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	30 Orang	30 Orang	25
6.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 layanan	5 layanan	5 layanan	5 layanan	100	5 layanan	5 layanan	100
		Persentase layanan administrasi umum terlayani	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Paket	4 Paket	25
		Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll) Jumlah belanja modal Alat Ukur/ Sketmat signat	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100	n/a	n/a	100
6.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah belanja modal Camera	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Handycam	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	100	n/a	n/a	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah belanja modal Hardis External	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Komputer PC All in One	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal laptop Core i5	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Mesin Hitung/hand counter	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Penghancur Kertas	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Steam Alat Cuci Mobil	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah belanja modal Scanner ADF	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Paket	4 Paket	25
		6.01.01.2.0 6.03	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	-	-	-	100	n/a	n/a	25
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Paket	4 Paket	25
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	n/a	n/a	100
			30000 lembar	6000 lembar	6000 lembar	6000 lembar	100	n/a	n/a	100
		6.01.01.2.0 6.05	Jumlah barang cetakan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Paket	4 Paket	25
			Jumlah pengadaan yang tersedia	6000 lembar	6000 lembar	6000 lembar	100	n/a	n/a	100
		6.01.01.2.0 6.06	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Paket	4 Paket	25
			Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	n/a	n/a	100
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	n/a	260 dokumen	260 dokumen	25
			750 OR	150 OR	150 OR	150 OR	100	n/a	n/a	100
		6.01.01.2.0 6.08	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	n/a	n/a	n/a	n/a	4 laporan	4 laporan	25
			Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	60 OH	60 OH	60 OH	100	n/a	n/a	100
	6.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	25 OH	25 OH	25 OH	100	n/a	n/a	100
			Jumlah minuman dan snack tamu	150 OR	150 OR	150 OR	100	n/a	n/a	100
			Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	150 OR	150 OR	150 OR	100	n/a	n/a	25

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	44 laporan	44 laporan	25
6.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 unit	48 unit	48 unit	48 unit	100	48 unit	48 unit	100
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah belanja mebeleir kantor (meja kursi pegawai)	4 unit	-	-	-	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	1 unit	33,3
6.01.01.2.0 7.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	1 unit	-	-	-	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	1 unit	1 unit	100
6.01.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan korden	5 unit	-	-	-	100	n/a	n/a	100
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor interior ruang (bantuan disabilitas)	25 unit	-	-	-	-	n/a	n/a	-
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	6 unit	6 unit	25
6.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100	3 layanan	3 layanan	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	3000 surat	30 surat	30 surat	30 surat	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Laporan	12 Laporan	25
		Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	60 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100	n/a	n/a	100
6.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x12)	60 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	60 rekening	12 rekening	12 rekening	12 rekening	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	36 Laporan	36 Laporan	25
6.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	60 bulan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100	n/a	n/a	100
		jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	48 bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 bulan	12 bulan	25
6.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100	4 layanan	4 layanan	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 2 terpelihara	40 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dan jenis kendaraan dinas roda 4 terpelihara	35 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	40 unit	8 unit	8 unit	8 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	35 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	832 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	208 Unit	208 Unit	25
6.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	14 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	225 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	10 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	42 unit	42 unit	25
6.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor terpelihara	450 meter	-	-	-	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-
6.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	75 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	60 unit	n/a	n/a	n/a	n/a	16unit	16 unit	25
6.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	100	25 dokumen	25 dokumen	100
		Nilai IKM PD	79,45 indeks	79,45 indeks	79,45 indeks	79,45 indeks	100	79,45 indeks	79,45 indeks	100
6.01.01.2.1 3.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dokumen SOP	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	n/a	n/a	100
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.02.2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100	4 layanan	4 layanan	100
		Persentase hasil pengawasan internal ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.02.2.0 1.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengangan Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan; RKA murni dan perubahan; dan Review BTI)	480 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	96 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	384 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	96 Laporan	96 Laporan	25
		Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	n/a	n/a	100
6.01.02.2.0 1.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	420 Audit	84 Audit	84 Audit	84 Audit	100	n/a	n/a	100
		Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	240 Obyek	48 Obyek	48 Obyek	48 Obyek	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	352 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	88 Laporan	88 Laporan	25
		Jumlah Dokumen hasil review Renstra 2021-2024	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
6.01.02.2.0 1.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	5 Laporan	5 Laporan	25
6.01.02.2.0 1.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	150 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	120 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	30 Laporan	30 Laporan	25
6.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	600 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	100	600 dokumen	600 dokumen	100
		Persentase hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
6.01.02.2.0 2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus	250 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	50 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	212 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	53 Laporan	53 Laporan	100
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan terlaksana	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	100	9 dokumen	9 dokumen	100
6.01.03.2.0 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Jumlah Dokumen PKPT, Peta Pengawasan, KMA	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	n/a	n/a	100
6.01.03.2.0 1.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	12 Rekomendasi	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	25
		Jumlah dokumen penyusunan alternatif penyelesaian masalah/langkah strategis untuk percepatan pencapaian kinerja pemerintah daerah : Nota dinas, action plan.	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen telaahan staf	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	24 Rekomendasi	n/a	n/a	n/a	n/a	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	25
6.01.03.2.0 2	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	3 layanan	3 layanan	3 layanan	3 layanan	100	3 layanan	3 layanan	100
6.01.03.2.0 2.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pendampingan dan asistensi terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	480 dokumen	98 dokumen	98 dokumen	98 dokumen	100	n/a	n/a	100
6.01.03.2.0 2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	764 Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	191 Perangkat Daerah	191 Perangkat Daerah	25
		Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
		Jumlah Dokumen hasil evaluasi ZI, WBK, WBBM	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen laporan money Korusupgah KPK	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen money gratifikasi	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Dokumen money PMPRB	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah hasil evaluasi maturitas SPJP	35 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	n/a	n/a	100
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	764 Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	191 Perangkat Daerah	191 Perangkat Daerah	25

Penjelasan tabel 2.1. di atas sebagai berikut :

- Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang belum memenuhi target yaitu :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, hal ini karena pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman realisasinya tidak maksimal karena tidak dapat memprediksi jamuan kunjungan tamu. Perjalanan Dinas Dalam Daerah terealisasi sebagian karena adanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Perjalanan dinas luar daerah terealisasi sebagian karena perjalanan dinas kegiatan lain sudah mencukupi, terutama perjalanan dinas untuk diklat yang berpedoman pada kalender diklat.
 - Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur, hal ini karena tidak adanya jadwal dan surat resmi permohonan pengiriman peserta diklat dari Pusdiklat BPKP.
 - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, karena Perjalanan dinas luar daerah untuk reviu LkjiP dikirim ke Kemenpan Jakarta lewat Kantor Pos, objek pemeriksaan khusus dan kasus tidak ada yang berasal dari luar daerah, dan minimnya pemanfaatan pulsa *call center* Saber Pungli.

Faktor penyebab/ penghambat :

- Faktor penyebab tidak tercapainya target tahun 2022 disebabkan karena kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan lintas SKPD, seperti pada kegiatan Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah dan kegiatan Penyelenggaraan Saber Pungli.
- Keterbatasan pegawai yang ada di Inspektorat termasuk dalam Jabatan Fungsional Auditor yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tugas yang dilimpahkannya.
- Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa yang tidak segera menindaklanjuti hasil rekomendasi terkait dengan hasil laporan pemeriksaan.

Faktor pendukung :

- Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi sistem informasi dan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan pengendalian program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Termasuk pembuatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta kode etik Inspektorat.

Kebijakan/tindakan yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor penghambat antara lain :

- Melakukan optimalisasi pembagian Auditor dan Penunjang Administrasi Pengawasan dengan memperhatikan beban kerja yang merata. Selain itu diupayakan untuk penambahan pegawai Jabatan Fungsional Auditor lewat jalur mutasi dari pegawai Jabatan Fungsional Umum dan atau Jabatan Struktural.
- Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance Consulting* dan *Early Warning*.
- Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.
- Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan,
- Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap

seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu juga melaksanakan asistensi terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul terkait pertanggungjawaban APBKal dan penyusunan Rencana APBKal tahun berikutnya.

- Membuka layanan klinik konsultasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

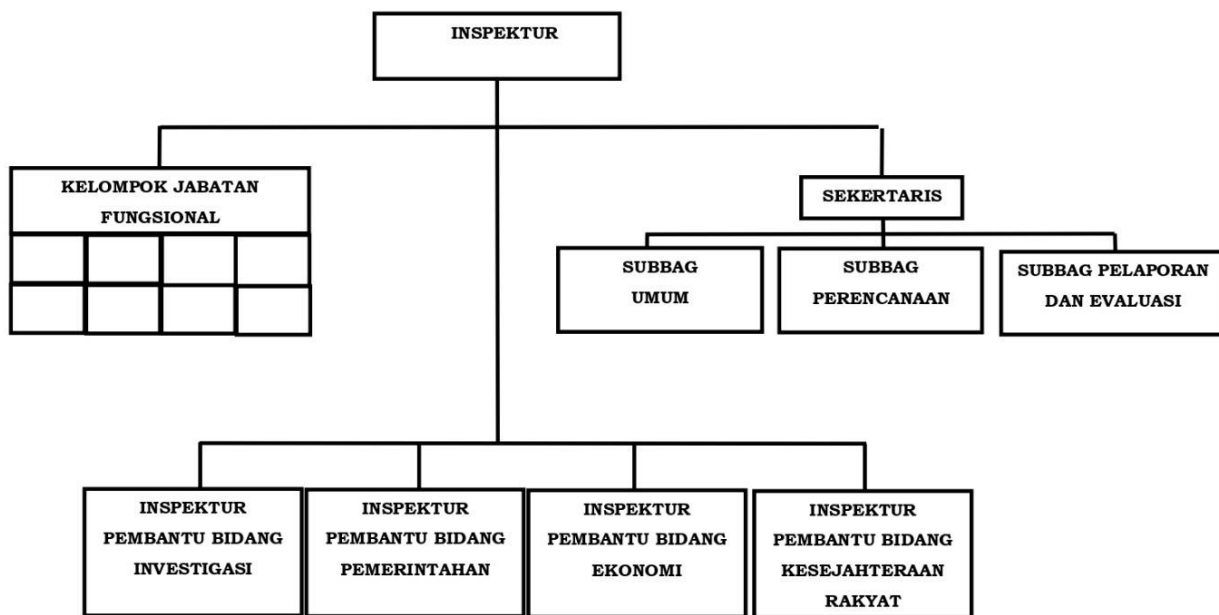
Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya diambil dari indikator *outcome* dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua kegiatan.

Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mengacu pada sasaran pembangunan menurut prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yaitu "*Reformasi Birokrasi*" dengan 2 (dua) sasaran daerah yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkatkan.

Pencapaian kinerja pelayanan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Satuan (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Inspektorat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indikator Kinerja Utama (IKU)										
	Nilai Maturitas SPIP	Indeks	3,2	3,86	3,87	3,88	3,85	3,85	3,87	3,88	Interval skor <i>Matirity Level SPIP</i> . Menunjukkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,00	81,00	81,50	82,00	81,77	81,77	81,50	82,00	Hasil dari Reviu Irda terkait evaluasi LKjIP Perangkat Daerah
2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)										
	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD terhadap RPJMD	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah program dalam Renja dibagi jumlah program dalam RKPD dan jumlah program dalam Renstra dibagi jumlah program dalam RPJMD
	Nilai IKM Inspektorat	Nilai	81	81	81,5	81,5	79,32	80,06	81,5	81,5	Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah unsur yang terisi dikali nilai penimbang
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan administrasi perkantoran dibagi jumlah administrasi perkantoran yang dibutuhkan x 100%
	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah realisasi pemenuhan sarana dan prasarana dibagi jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan x 100%
	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang dibagi jumlah PNS x 100%
	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Prosentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah laporan keuangan disusun tepat waktu dibagi jumlah laporan keuangan disusun x 100%



Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Gambar 2.1

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJPD yang telah dirumuskan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kondisi :

- masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan;
- belum efektifnya pengawasan melekat;
- kecenderungan pelanggaran disiplin aparatur daerah dari tahun ke tahun meningkat; dan
- masih kurangnya pengertian masyarakat dalam masalah hukum.

Permasalahan :

- kecenderungan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersifat boros dan bersifat rutinitas, belum menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan tugasnya;
- kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pada satu personil;
- sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal;
- kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan; dan
- rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

2. Dampak terhadap Pencapaian

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, Inspektorat Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Jika dilihat dari

berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/ pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum semua aparaturnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Belum terpenuhinya sumber daya manusia baik untuk Jabatan Fungsional Auditor, P2 UPD maupun fungsional umum;
- c. Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang belum memadai dan mencukupi;
- d. Perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja; dan
- e. Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang belum memadai dan mencukupi;
- f. Belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap OPD yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasi faktor ekstern terutama merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

Kekuatan

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai beberapa hal yang dapat menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu :

- a. Kode Etik dan Standar Kerja yang jelas
Beberapa standar kerja Inspektorat antara lain Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Gunungkidul. Standar Kerja disusun untuk menjaga agar kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.
- b. Pembagian kerja yang jelas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
- b. Piagam Audit (*Audit Charter*).
- c. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul dan Surat Perintah Tugas sebagai aplikasi program kerja Inspektorat Daerah yang merupakan rangkaian ketentuan mengenai pembagian kerja.

Kelemahan

Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :

- a. Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah, atau menaikkan kepada Bupati/Wakil

Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.

b. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.

Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi prasarana dan sarana kerja juga tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti kendaraan operasional untuk mendukung sistem kerja tim, ruang kerja, ruang dokumen/arsip yang masih terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

Peluang (*Opportunities*)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang memberikan kemungkinan organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar yaitu :

1. Organisasi Pemerintah Daerah mutlak memerlukan Sistem Pengawasan Internal.

Semua teori manajemen menyebutkan pengawasan atau pengendalian (*controlling*) sebagai salah satu fungsi manajemen. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mutlak memerlukan Inspektorat Daerah untuk menjamin dilaksanakannya kebijakan demi tertibnya organisasi sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Daerah dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akuntabel.

2. Masyarakat menghendaki penegakan hukum.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat menginginkan suatu pemerintahan yang lebih baik. Isu KKN ditanggapi oleh Pemerintah dengan mengeluarkan seperangkat kebijakan pemberantasan KKN. Beberapa kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain :

- a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
- e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
- f. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/1860/KSP.00/70-73/03/2022 tentang Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022.

3. Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan.

Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan adalah Lembaga/PD dan Kalurahan dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagai UPT dari Dinas Pendidikan, Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian semua potensi yang ada dapat dilaksanakan secara optimal. Setiap tahunnya Inspektorat telah berusaha melaksanakan pendampingan terhadap 5 (aspek) pemeriksaan

seperti Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Penatausahaan Keuangan Aset, Persediaan, Pengelolaan Piutang Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, selain itu juga melakukan asistensi dengan sasaran penyusunan pertanggungjawaban APBKal serta penyusunan Rencana APBKal terhadap 144 kalurahan.

Ancaman (Threats)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang membahayakan atau mengancam eksistensi organisasi yaitu :

1. Komitmen manajemen terhadap pengawasan lemah. Inspektorat Daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen (*Decision Maker*).
2. Kurangnya kepedulian obyek pemeriksaan terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Kepedulian obyek pemeriksaan dalam tindaklanjut hasil pemeriksaan diukur dari kecepatan penyelesaian pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Semakin lambat tindaklanjut diselesaikan, semakin rendah tingkat kepedulian obrik terhadap eksistensi Inspektorat Daerah dan perbaikan kinerja instansi itu sendiri.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah :

1. Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan.
2. Penambahan PNS baik Jabatan Fungsional Auditor, P2UPD untuk memenuhi kekurangan personel pemeriksa, serta penambahan SDM Fungsional Umum untuk membantu tugas-tugas di kesekretariatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dibutuhkan.

Penjabaran program kegiatan berdasarkan reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3

Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	4.003.776.089	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100%	4.003.776.089	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Layanan	55.798.500	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Layanan	55.798.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	51.507.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	51.507.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	320.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	320.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	320.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	320.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	642.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	642.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	555.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	555.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	762.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	762.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.692.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.692.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 Dokumen	3.299.946.589	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 Dokumen	3.299.946.589	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan (49X14)	3.297.253.589	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 Orang/bulan (49X14)	3.297.253.589	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	693.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	693.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 Orang	39.100.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 Orang	39.100.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang	39.100.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49 Orang	39.100.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 Layanan	271.372.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 Layanan	271.372.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.264.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.264.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.229.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.229.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	65.185.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	65.185.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.617.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.617.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.750.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.750.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	108.326.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	108.326.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 unit	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 unit	0	
	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	0	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 Layanan	86.084.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 Layanan	86.084.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	79.784.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	79.784.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	251.475.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	251.475.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 Unit	169.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 Unit	169.700.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	18.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	18.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	57.775.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	57.775.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	141 Unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	141 Unit	6.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	501.170.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	501.170.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 Layanan	257.270.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 Layanan	257.270.000	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96 Laporan	54.375.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96 Laporan	54.375.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	19.000.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 Laporan	19.000.000	
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	46.935.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 Laporan	46.935.000	
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	136.960.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 Laporan	136.960.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120 Dokumen	243.900.000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120 Dokumen	243.900.000	
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53 Laporan	243.900.000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53 Laporan	243.900.000	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100%	244.850.000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100%	244.850.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 Dokumen	2.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	9 Dokumen	2.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	1.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	1.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 Rekomendasi	1.000.000	
	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	3 Layanan	242.850.000	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Layanan pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	3 Layanan	242.850.000	
	Pendampingan dan Asistensi Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 Perangkat Daerah	240.000.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 Perangkat Daerah	240.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47 Perangkat Daerah	2.850.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47 Perangkat Daerah	2.850.000	
					4.749.796.089					4.749.796.089	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Inspektorat Daerah tidak terdapat usulan program atau kegiatan yang berhubungan langsung dari masyarakat, karena sesuai dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP di samping standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara secara nasional.

Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Adapun tujuan yang dijadikan pedoman Inspektorat Daerah adalah “Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat”.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Rancangan Renstra. Dalam menyusun tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Tahun 2024, Inspektorat berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 serta mengacu pada tema dan prioritas pembangunan dan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 yaitu “*Optimalisasi Ketahanan ekonomi daerah dalam mewujudkan Taraf Hidup masyarakat yang bermartabat melalui pembangunan infrastruktur, investasi, pariwisata, ekonomi kerakyatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia*” dengan prioritas dan sasaran daerah yang dijadikan acuan untuk Inspektorat Daerah adalah “*Reformasi Birokrasi*”.

Selanjutnya hubungan antara tujuan dengan sasaran Inspektorat Daerah dituangkan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Inspektorat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan PD	Target Kinerja Tujuan PD Tahun 2026
1.	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal	1. Nilai Maturitas SPIP 2. Nilai AKIP PD	3,90 83

Tabel 3.2
Sasaran Inspektorat Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Sasaran PD Tahun 2024
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	3,88
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	82

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja IKU	Target Kinerja IKU
1.	Nilai Maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3,88

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, maka Inspektorat Daerah mendukung Misi pertama Bupati yaitu“ Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis” serta Sasaran Daerah adalah “Kapasitas Tata Kelola Pemerintah meningkat” dengan Prioritas Daerah yaitu Reformasi Birokrasi.

Sasaran tersebut dialirkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024, yang terdiri dari 3 Program dijabarkan dalam 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan seperti tertuang pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat Daerah tahun 2024

No	Sasaran	Nama Program/Kegiatan
1.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Program : Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
		Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi
2.	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Penataan Organisasi
--	--	---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah.

Pagu anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat untuk Tahun 2024 sejumlah Rp4.749.796.089,00 (Empat milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh Sembilan rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) program, dan 11 (sebelas) kegiatan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah mengacu pada prioritas yang kedua yaitu “*Reformasi Birokrasi*”, seperti yang tertuang dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Prioritas, Sasaran, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Prioritas	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Sasaran PD	KODE	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggungjawab
Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah meningkat	Nilai Maturitas SPIP	3,88	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	501.170.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	257.270.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	54.375.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	46.935.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	136.960.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	243.900.000	Inspektorat Daerah
					6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	243.900.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	244.850.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	2.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	242.850.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.850.000	Inspektorat Daerah
					6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.003.776.089	Inspektorat Daerah
	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Nilai AKIP PD	81,5		6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.798.500	Inspektorat Daerah
					6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.507.500	Inspektorat Daerah
					6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	320.000	Inspektorat Daerah

				6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	320.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	642.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	555.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	762.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.692.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.299.946.589	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.297.253.589	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	693.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.100.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	-	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.100.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.372.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.264.500	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.229.500	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	65.185.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.617.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	0	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.326.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.084.000	Inspektorat Daerah
				6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.300.000	Inspektorat Daerah

					6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.784.000	Inspektorat Daerah
					6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.475.000	Inspektorat Daerah
					6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.700.000	Inspektorat Daerah
					6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	Inspektorat Daerah
					6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.775.000	Inspektorat Daerah
					6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	Inspektorat Daerah
							4.749.796.089	

Tabel 4.3
 Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi
 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
 Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Maju (Rp) 2025	PD
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.003.776.089	9.148.148.460	IRDA
	Kegiatan :			
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.798.500	70.764.500	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.299.946.589	8.126.466.546	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.100.000	87.050.000	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.372.000	497.872.164	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	50.000.000	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.084.000	165.310.750	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.475.000	150.674.500	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	501.170.000	1.185.000.000	IRDA
	Kegiatan :			
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	257.270.000	589.000.000	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	243900000	596.000.000	
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	244.850.000	321.030.000	IRDA
	Kegiatan :			
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2000000	6.535.000	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	242850000	314.495.000	
		4.749.796.089	10.654.168.460	

Tabel 4.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	100 persen	4.003.776.089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	9.148.148.461
6	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	11 layanan	55.798.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11 layanan	70.764.500
6	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Dokumen	51.507.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	62.274.000
6	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	567.500
6	01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	1 Dokumen	320.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	570.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	642.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.728.000
6	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	2 Dokumen	555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	1.060.000
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	17 Laporan	762.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	17 Laporan	1.965.000
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	5 Laporan	1.692.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	2.600.000
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	29 dokumen	3.299.946.589	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	29 dokumen	8.126.476.546
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	686 Orang/ Bulan	3.297.253.589	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	686 Orang/ Bulan	8.118.286.546
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	1 Laporan	693.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	790.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	13 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	13 Laporan	7.400.000
6	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	49 orang	39.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 orang	87.050.000
6	01	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	6 Dokumen	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	6.550.000
6	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	49 Orang	39.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Orang	80.500.000
6	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	5 layanan	271.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 layanan	497.872.165
6	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Paket	6.264.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	13.105.000
6	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Paket	75.229.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	193.000.000
6	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Paket	65.185.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	127.561.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Paket	9.617.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Paket	19.655.900
6	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	0 Dokumen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	260 Dokumen	1.565.000
6	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Laporan	6.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Laporan	5.250.000
6	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	49 Laporan	108.326.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	49 Laporan	137.735.265
6	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	48 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	48 unit	50.000.000
6	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	0 unit	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 unit	50.000.000
6	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	3 layanan	86.084.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 layanan	165.310.750
6	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	12 Laporan	6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	1.310.750
6	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	36 Laporan	79.784.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	36 Laporan	164.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 layanan	251.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 layanan	150.674.500
6	01	01	2,09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	182 Unit	169.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		182 Unit	114.500.000
6	01	01	2,09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	45 Unit	18.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		45 Unit	16.424.500
6	01	01	2,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	1 Unit	57.775.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.000.000
6	01	01	2,09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	141 unit	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		141 unit	9.750.000
6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	100 persen	501.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 persen	1.185.000.000
6	01	02	2,01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 layanan	257.270.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 layanan	589.000.000
6	01	02	2,01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	96 Laporan	54.375.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		96 Laporan	160.000.000
6	01	02	2,01	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	88 Laporan	19.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		88 Laporan	160.000.000

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	5 Laporan	46.935.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Laporan	114.000.000
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	30 Laporan	136.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Laporan	155.000.000
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	120 dokumen	243.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	120 dokumen	596.000.000
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	53 Laporan	243.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	53 Laporan	596.000.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	100 persen	244.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 persen	321.030.000
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan terlaksana	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	9 dokumen	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9 dokumen	6.535.000
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	4 Rekomendasi	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4 Rekomendasi	3.260.000
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	6 Rekomendasi	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6 Rekomendasi	3.275.000
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	3 layanan	242.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 layanan	314.495.000

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	191 perangkat daerah	240.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		191 perangkat daerah	305.000.000
6	01	03	2,02	01							
6	01	03	2,02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab. Gunungkidul	47 perangkat daerah	2.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.495.000
							4.749.796.089				10.654.168.460

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi paparan risiko PD dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen risiko. Manajemen risiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing PD yang memiliki risiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pengawasan berbasis risiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran daerah maupun sasaran PD.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan-kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka pemantauan perkembangan penyelesaian temuan.
2. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan internal maupun eksternal.
3. Melaksanakan asistensi/pendampingan terhadap 144 kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban APBKal dan rencana penyusunan APBKal tahun berikutnya.
4. Membuka layanan klinik konsultasi.
5. Melakukan Survei Penilaian Integritas.
6. Meningkatkan Kapasitas SDM, Sarana dan Prasarana.

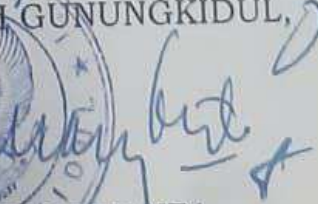
Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Wonosari, 26 Juli 2023

INSPEKTORAT DAERAH,


SAPTOYO

BUPATI GUNUNGKIDUL,


SUNARYANTA